

**PENGARUH PERSEPSI SIKAP, NORMA SUBYEKTIF DAN KENDALI
PERILAKU TERHADAP NIAT MENGALOKASIKAN ANGGARAN
BERBASIS LINGKUNGAN HIDUP PADA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN/ KOTA DI PROVINSI LAMPUNG**

(Tesis)

**OLEH
AHMAD HARIS SAPUTRA**



**MAGISTER ILMU AKUNTANSI
FEKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2017

**PENGARUH PERSEPSI SIKAP, NORMA SUBYEKTIF DAN KENDALI
PERILAKU TERHADAP NIAT MENGALOKASIKAN ANGGARAN
BERBASIS LINGKUNGAN HIDUP PADA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN/ KOTA DI PROVINSI LAMPUNG**

Tesis

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
MAGISTER SAINS AKUNTANSI
Pada
Program Magister Ilmu Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung**



OLEH

AHMAD HARIS SAPUTRA

NPM 1421031045

**MAGISTER ILMU AKUNTANSI
FEKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2017

ABSTRAK

Pengaruh Persepsi Sikap, Norma Subyektif Dan Kendali Perilaku Terhadap Niat Mengalokasikan Anggaran Berbasis Lingkungan Hidup Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Di Provinsi Lampung.

Oleh

Ahmad Haris Saputra

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris: pengaruh persepsi sikap, persepsi norma subyektif, persepsi kendali perilaku terhadap niat mengalokasikan anggaran berbasis lingkungan hidup pada pemerintah daerah kabupaten/ kota di provinsi lampung. Penelitian ini dilakukan pada pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, dengan menggunakan populasi sebanyak 103 responden. Metode pengumpulan data menggunakan survey, sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah uji validitas dan uji reliabilitas, pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan analisis regresi.

Hasil penelitian menunjukkan (1) Persepsi sikap berpengaruh positif terhadap niat mengalokasikan anggaran berbasis lingkungan hidup. Hal ini membuktikan bahwa pemerintah daerah bersikap mendukung alokasikan anggaran berbasis lingkungan hidup, dengan demikian akan berdampak positif pada perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. (2) Persepsi norma subyektif berpengaruh positif terhadap niat mengalokasikan anggaran berbasis lingkungan hidup, Hal ini membuktikan bahwa pejabat dilingkungan pemerintah daerah berharap adanya anggaran berbasis lingkungan hidup, Dengan mengalokasikan anggaran berbasis lingkungan hidup akan berdampak pada peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. (3) persepsi kendali perilaku berpengaruh positif terhadap niat mengalokasikan anggaran berbasis lingkungan hidup. Semakin tinggi persepsi kendali perilaku pemerintah daerah maka niat mengalokasikan anggaran berbasis lingkungan hidup cenderung akan meningkat pula. Disarankan kepada pemerintah daerah dan aparat sipil negara yang agar lebih memprioritaskan anggaran berbasis lingkungan hidup, pendekatan kepada masyarakat, pemanfaatan sarana prasarana yang ada supaya tujuan perlindungan dan pengelolaan LH sebagaimana diamanatkan UUD 32 tahun 2009 bisa tercapai sepenuhnya.

Kata kunci: Niat Mengalokasikan Anggaran Berbasis Lingkungan Hidup, Persepsi sikap pemerintah daerah, Persepsi Norma subyektif Pemerintah daerah, Persepsi Kendali Perilaku Pemerintah Daerah.

ABSTRACT

Effects of Perception of Attitudes, Subjective Norms and on Behavior controls on the Against Intention Allocating Budget-Based on the Environmental live the on Local Government Regency / City In Lampung Province.

**By
Ahmad Haris Saputra**

This study aims to test empirically: the influence of perceptions of attitudes, perceptions of subjective norms, perceptions of behavioral control of the intention of allocating environmental-based budget on the local government districts in Lampung province. This research was conducted at local government of Regency / City in Lampung Province, using population as many as 103 respondents. Methods of data collection using survey, while data analysis techniques used are the validity and reliability test, hypothesis testing is done by using regression analysis.

The results showed (1) Perceptions of attitudes have a positive effect on the intention of allocating budget-based on the environment. This proves that local governments support the allocation of environment-based budgets, thereby positively impacting the protection and management of the environment. (2) The perception of subjective norms has a positive effect on the intention of allocating an environment-based budget. This proves that local government officials expect environment-based budgets. By allocating environment-based budgets will have an impact on improving environmental protection and management. (3) the perception of behavioral control has a positive effect on the intention of allocating an environment-based budget. The higher the perception the behavior controls on the local on the Government's, that intention of allocating an environment-based budget is likely to increase as well. It is suggested to the local government and civil state apparatus that to prioritize environment based budget, approach to society, utilization of existing infrastructure so that the objective of LH protection and management as mandated by UUD 32 year 2009 can be reached fully.

Keywords: Intentions on Allocate Environment Based Budget, Perception attitude of local government, perception of subjective norm of local government, perception of behavior control of local government.

Judul Tesis : **PENGARUH PERSEPSI SIKAP, NORMA SUBYEKTIF,
DAN KENDALI PERILAKU TERHADAP NIAT
MENGALOKASIKAN ANGGARAN BERBASIS
LINGKUNGAN HIDUP PADA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI LAMPUNG**

Nama Mahasiswa : **Ahmad Haris Saputra**

No. Pokok Mahasiswa : 1421031045

Program Studi : Magister Ilmu Akuntansi

Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung



MENYETUJUI

1. **Komisi Pembimbing**

Susi Sarumpaet, S.E., M.B.A., Ph.D., Akt.
NIP 19691008 199501 2 001

Prof. Dr. Lindrianasari, S.E., M.Si., Akt.
NIP 19700817 199703 2 002

2. **Ketua Program Magister Ilmu Akuntansi**

Susi Sarumpaet, S.E., M.B.A., Ph.D., Akt.
NIP 19691008 199501 2 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji :

Ketua : Susi Sarumpaet, S.E., M.B.A., Ph.D., Akt. 

Sekretaris : Prof. Dr. Lindrianasari, S.E., M.Si., Akt. 

Penguji Utama : Dr. Agrianti Komalasari, S.E., M.Si., Akt. 

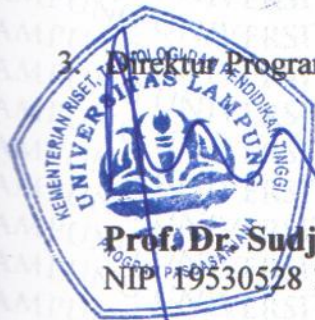
Sekretaris : Dr. Nova Mardiana, S.E., M.M. 

2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Prof. Dr. H. Satria Bangsawan, S.E., M.Si.
NIP. 19610904 198703 1 011

3. Direktur Program Pascasarjana



Prof. Dr. Sudjarwo, M.S.
NIP. 19530528 198103 1 002

4. Tanggal Lulus Ujian : 02 Oktober 2017

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Haris Saputra
NIM : 1421031045
Jurusan/Program Studi : Magister Ilmu Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bebas dari peniruan terhadap karya dari orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain dirujuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila di kemudian hari terbukti dalam tesis ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Bandar Lampung, 02 Oktober 2017



ng membuat pernyataan

Ahmad Haris Saputra

RIWAYAT HIDUP

Penulis lahir di Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung, pada tanggal 29 Maret 1977 anak ketiga dari lima bersaudara. Penulis lahir dari pasangan suami istri Bapak Hamid Yusuf dan Ibu Rosmaini. Alamat tempat tinggal sekarang di Perum. Sejahtera Blok D.4 kelurahan Hajimena Kecamatan Natar Lampung Selatan Provinsi Lampung.

Penulis menyelesaikan Pendidikan Dasar di SDN 01 Penengahan La'ay Krui Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat diselesaikan pada tahun 1989. Sekolah menengah tingkat pertama (SMP Negeri 1 Krui) diselesaikan pada tahun 1992, Sekolah menengah umum tingkat atas (SMU Negeri 1 Krui) diselesaikan pada tahun 1995, S1 Ekonomi Universitas Malahayati Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2003.

Pada tahun 2015 penulis melanjutkan studi pada Program Magister Ilmu Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung Batch 2 (dua) Program Bea siswa Start BPKP.

MOTTO

- *Berperilaku jujur, berpikiran positif dan berbuat yang terbaik untuk keluarga dan lingkungan.*
- *Keyakinan bahwa yang apa yang kita jalani adalah yang terbaik yang diberikan Allah SWT.*

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT kupersembahkan tesis ini kepada:

1. *Yang kusayangi Bapak Rosmaini, dan aki Hamid Yusuf, Bapak Neli asma dan bak Hadriansyah yang selalu mendoa'akan yang terbaik untuk penulis*
2. *Pendamping setiaku, isteriku tercinta dan tersayang Desi Noviyanti, Amd. Kep yang senantiasa menemani dan mendoakan penulis dalam suka dan duka serta putri ku yang ku sayangi Khairunnisa Salsabila yang senantiasa memberi semangat baru bagi penulis*
3. *Kakak dan adikku, Ewo yuli, Jemudo parhan, Wo nuzhuda, Pedra dan tina, Apri dan Firza, Atin yus dan kaka batin neli, Ewo siti dan atin war, Udo lis dan kaka radin ita, terimakasih atas do'a dan dukunganny.*
4. *Keponakan - Keponakanku, Dimas, Ramdo, aji, Bilqis, Rosa dan Djhaki, Farel dan Bagas, Jimi dan Fcen*
5. *Almamaterku tercinta.*

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahilalamin Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga tesis ini dapat diselesaikan dengan segala kekurangannya. Tesis dengan judul **“Pengaruh Persepsi Sikap, Norma Subyektif dan Kendali Perilaku Terhadap Niat Mengalokasikan Anggaran Berbasis Lingkungan Pada Pemerintah Daerah/ Kota Di Provinsi Lampung”** merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan studi pada Program Magister Ilmu Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M.P. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Prof. Dr. H. Satria Bangsawan, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
3. Bapak Prof. Dr. Sudjarwo, M.S. selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung;
4. Ibu Susi Sarumpaet, S.E., M.B.A., Ph.D., Akt., selaku Ketua Program Magister Ilmu Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
5. Ibu Susi Sarumpaet, S.E., M.B.A., Ph.D., Akt., selaku Pembimbing I atas kesediaan waktu dan pemikirannya dalam memberikan bimbingan, arahan kritik, serta saran pada proses penyelesaian tesis ini;

6. Prof. Dr. Lindrianasari, S.E., M.Si., Akt. selaku Pembimbing II atas kesediaan waktu dan pemikirannya dalam memberikan bimbingan, arahan, kritik, serta saran pada proses penyelesaian tesis ini;
7. Ibu Dr. Agrianti Komalasari, S.E., M.Si., A.kt. selaku penguji utama
8. Ibu Dr. Nova Mardiana, S.E., MM selaku sekretaris penguji
9. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah dan seluruh staf
10. Staf administrasi MIA UNILA Mas Andri Kasrani dan nico
11. Mak dan Aki, Mak dan Bak terimakasih atas do'a dan dukungannya selama ini.
12. Istri tercinta Desi Noviyanti, Amd.Kep. dan Anakku Khairunnisa Salasabila yang senantiasa sabar dan selalu mendo'akan penulis dalam proses penyelesaian kuliah dan tesis ini.
13. Kakak dan adikku, Cwo yuli, Temudo parhan, Wo nurhuda, Pedra dan tina, Apri dan Firza, Atin yus dan kakabatin neli, Cwo siti dan atin war, Udo lis dan kakaradin ita, terimakasih atas do'a dan dukungannya.

Sebagai penutup Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, hal ini disebabkan keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis, namun besar harapan semoga tesis yang sederhana ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua.

Bandar Lampung, 02 Oktober 2017

Penulis

Ahmad Haris Saputra

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
RIWAYAT HIDUP	vi
PERSEMBAHAN DAN MOTTO.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Peneliti.....	7
BAB II KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN	
HIPOTESIS.....	8
2.1 Landasan Teori.....	8
2.1.1 <i>Theory of Planned Behavior (TPB)</i>	8
2.1.1.1 Sejarah Dan Pengembangan <i>Theory of Reasoned Action</i> dan <i>Theory of Planned Behavior</i>	8
2.1.2 Sikap.....	13
2.1.3 Norma Subyektif	15
2.1.4 Kendali Perilaku.....	16
2.1.5 Niat Mengalokasikan anggaran Berbasis LH.....	17
2.1.6 Penelitian Terdahulu	19
2.2 Kerangka Konsep	21

2.3 Pengembangan Hipotesis	23
2.3.1 Pengaruh persepsi sikap terhadap niat mengalokasikan anggaran LH di Provinsi Lampung	23
2.3.2 Pengaruh persepsi norma subyektif terhadap niat mengalokasikan anggaran LH di Provinsi Lampung.....	24
2.3.3 Pengaruh persepsi kendali perilaku terhadap niat mengalokasikan anggaran berbasis lingkungan hidup	26
BAB III METODE PENELITIAN.....	29
3.1 Populasi	29
3.2 Data penelitian	29
3.2.1 Jenis penelitian.....	29
3.2.2 Metode pengumpulan data.....	30
3.3 Definisi operasional variabel	30
3.4 Metode analisis data	32
3.4.1 Uji validitas	32
3.4.2 Uji reliabilitas	32
3.4.3 Uji hipotesis.....	33
3.4.3.1 Nilai R ² (Koefisien Determinan).....	33
3.4.3.2 Uji t.....	34
3.4.3.3 Uji f.....	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
4.1 Gambaran Umum Provinsi Lampung	36
4.2 Diskripsi Data	37
4.3 Profil Responden	37
4.4 Hasil Penelitian	38
4.4.1 Uji Validitas Instrumen	39

4.4.1.1 Uji Validitas untuk Variabel Persepsi Sikap.....	40
4.4.1.2 Uji Validitas untuk Variabel Persepsi Norma subyektif ..	40
4.4.1.3 Uji Validitas untuk Variabel Persepsi Kendali Perilaku.....	41
4.4.1.4 Uji Validitas untuk Variabel Niat.....	42
4.4.2 Uji Reliabilitas Instrumen.....	42
4.4.2.1 Uji Reliabilitas Variabel Persepsi Sikap	42
4.4.2.2 Uji Reliabilitas Variabel Persepsi Norma subyektif.....	43
4.4.2.3 Uji Reliabilitas Variabel Persepsi Kendali perilaku.....	44
4.4.2.4 Uji Reliabilitas Variabel Niat.....	44
4.4.3 Statistik Deskriptif	45
4.4.3.1 Pernyataan responden tentang variabel persepsi sikap.....	45
4.4.3.2 Pernyataan responden tentang variabel persepsi Norma Subyektif.....	46
4.4.3.3 Pernyataan responden tentang variabel persepsi kendali perilaku.....	47
4.4.3.4 Pernyataan responden tentang variabel persepsi niat.....	48
4.4.4 Uji Model.....	48
4.4.5 Uji Hipotesis.....	49
4.4.5.1 Uji hipotesis Pengaruh Persepsi Sikap Terhadap Niat Mengalokasikan Anggaran Berbasis Lingkungan Hidup Pada Pemerintah Daerah di Provinsi Lampung.....	49
4.4.5.2 Uji hipotesis Pengaruh Persepsi Norma Subyektif Terhadap Niat Mengalokasikan Anggaran Berbasis Lingkungan Hidup Pada Pemerintah Daerah di Provinsi Lampung.....	52
4.4.5.3 Uji hipotesis Pengaruh Persepsi Kendali Perilaku Terhadap Niat Mengalokasikan Anggaran Berbasis Lingkungan	

Hidup Pada Pemerintah Daerah di Provinsi Lampung.....	54
4.4.5.4 Uji hipotesis Pengaruh Persepsi Sikap,Norma Subyektif, Kendali Perilaku Terhadap Niat Mengalokasikan Anggaran Berbasis Lingkungan Hidup Pada Pemerintah Daerah di Provinsi Lampung.....	57
4.4.6 Pembahasan	58
4.4.6.1 Pengaruh Persepsi Sikap Terhadap Niat Mengalokasikan Anggaran Berbasis Lingkungan Hidup Pada Pemerintah Daerah di Provinsi Lampung.....	58
4.4.6.2 Pengaruh Persepsi Norma Subyektif Terhadap Niat Mengalokasikan Anggaran Pada Pemerintah Daerah di Provinsi Lampung.....	60
4.4.6.3 Pengaruh Persepsi Kendali Perilaku Terhadap Niat Mengalokasikan Anggaran Pada Pemerintah Daerah di Provinsi Lampung.....	61
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	62
5.1 Kesimpulan	62
5.2 Keterbatasan Penelitian	63
5.3 Saran	64

DAFTAR DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1. Masalah Lingkungan Hidup Di Provinsi Lampung.....	3
1.2. Alokasi APBD Bidang Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2015.....	4
2.1 Penelitian Terdahulu.....	19
3.1 Operaional Variabel.....	30
3.2 Interpretasi Koefisien Korelasi.....	34
4.1 Administrasi Pemerintahan di Provinsi Lampung.....	36
4.2 Hasil Analisis Pengembalian Kuesioner.....	37
4.3 Profil Responden Meliputi jenis Kelamin, Jabatan, Pendidikan.....	37
4.4 Uji Validitas Persepsi Sikap.....	40
4.5 Uji Validitas Persepsi Norma subyektif.....	40
4.6 Uji Validitas Persepsi Kendali Perilaku.....	41
4.7 Uji Validitas Niat.....	42
4.8 Uji Validitas Reliabilitas Variabel Persepsi Sikap	42
4.9 Uji Reliabilitas Variabel Persepsi Norma subyektif.....	43
4.10 Uji Reliabilitas Variabel Persepsi Kendali Perilaku.....	44
4.11 Uji Reliabilitas Variabel Persepsi Niat.....	45
4.12 Statistik Deskriptif Variabel Persepsi Sikap.....	45
4.13 Statistik Deskriptif Variabel Persepsi Norma Subyektif.....	46
4.14 Statistik Deskriptif Variabel Persepsi Kendali Perilaku.....	47
4.15 Statistik Deskriptif Variabel Persepsi Niat.....	48
4.16 Uji Model Penelitian.....	48
4.17 Tabel Perhitungan Tentang Korelasi Persepsi Sikap Terhadap Niat Mengalokasikan anggaran Berbasis Lingkungan Hidup dari 103 Responden.....	49

4.18. Koefisien Determinasi Persepsi Sikap Terhadap Niat Mengalokasikan Anggaran Berbasis Lingkungan Hidup Keuangan Pemerintah Daerah.....	50
4.19. Uji Hipotesis Pengaruh Persepsi Sikap Terhadap Niat Mengalokasikan Anggaran Berbasis Lingkungan Hidup.....	51
4.20. Koefisien Determinasi Persepsi Norma Subyektif Terhadap Niat Mengalokasikan Anggaran Berbasis Lingkungan Hidup.....	53
4.21. Uji Hipotesis Pengaruh Persepsi Norma Subyektif terhadap Niat Mengalokasikan Anggaran Berbasis Lingkungan Hidup.....	53
4.22. Koefisien Determinasi Persepsi Kendali Perilaku Terhadap Niat Mengalokasikan Anggaran Berbasis Lingkungan Hidup.....	55
4.23. Uji Hipotesis Pengaruh Persepsi Kendali Perilaku Terhadap Niat Mengalokasikan Anggaran Berbasis Lingkungan Hidup.....	56
4.24. Perhitungan Koefisien Korelasi Secara Semultan.....	57

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1. Gambar Representasi Dari Teori Perilaku Yang direncanakan, Ajzen 2005.....	10
2.2. Gambar Tentang Teori Tindakan Beralasan, Ajzen 1975....	11
2.3. Kerangka Konsep Penelitian.....	22

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Mengingat semakin kompleksnya permasalahan dan pentingnya lingkungan hidup bagi kehidupan, Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 45 telah mengamanahkan anggaran berbasis lingkungan hidup sebagai berikut:

(1) Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia serta Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah wajib mengalokasikan anggaran yang memadai untuk membiayai: a. Kegiatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan b. Program Pembangunan yang berwawasan Lingkungan Hidup. (2) Pemerintah wajib mengalokasikan anggaran dana alokasi khusus lingkungan hidup yang memadai untuk diberikan kepada daerah yang memiliki kinerja Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang baik.

Selain itu pada pasal 46 dipertegas pula bahwa, selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, dalam rangka Pemulihan Kondisi Lingkungan Hidup yang kualitasnya telah mengalami Pencemaran dan/atau Kerusakan pada saat Undang-Undang ini ditetapkan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran untuk Pemulihan Lingkungan Hidup.

Permasalahan utama pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia meliputi polusi udara, polusi air, limbah padat yang berbahaya, polusi dalam pertambangan dan terumbu karang (Suhardjanto, 2008). Berdasarkan perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 2014 yang dilihat dari indikator Kualitas udara yang secara nasional memiliki angka indeks 80,54 masih relatif baik, Air yang secara nasional memiliki angka indeks 52,19 berada dalam kondisi sangat kurang atau mengkhawatirkan, tutupan hutan yang secara nasional memiliki angka indeks 59.01 yang dapat diartikan berada dalam kondisi relatif kurang. Berdasarkan

perhitungan IKLH 2014, IKLH Nasional masih berada pada posisi Angka 63,42 yang memiliki arti kurang (Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia).

Di Provinsi Lampung masalah utama lingkungan hidup adalah kerusakan ekosistem wilayah pantai pesisir (kerusakan terumbu karang, hutan mangrove, pesisir pantai dan pencemaran laut), kelangkaan ruang terbuka hijau, penebangan liar yang berarti kerusakan hutan, dan banjir (Santoso 2007). Namun untuk perairan, terutama pantai barat Lampung dan teluk Semangka masih tergolong baik karena minimnya aktivitas manusia yang berpotensi mencemari lingkungan laut.

Begitu pula luasan hutan dari luas 1.004.735 ha yang masih dalam kategori penutupan hutan adalah seluas 325.400 ha atau sekitar 32,39%. Tingkat kerusakan hutan diprediksi mencapai 56,45% atau seluas 567.200 ha yang diindikasikan dengan luasan penutupan yang termasuk kategori nonhutan. Akan tetapi bila dibandingkan dengan kondisi tahun 2008 dengan tingkat kerusakan hutan mencapai 65,47%, maka upaya-upaya rehabilitasi dan pengelolaan kawasan hutan telah meningkatkan perbaikan hutan sebesar 9,02% pada tahun 2012 walaupun belum terlalu signifikan (Pusat Pengelolaan Ekoregion Sumatera Kementerian Lingkungan Hidup).

Lebih jelasnya masalah lingkungan hidup di Provinsi Lampung akan disajikan menurut penyebab dan lokasinya pada tabel 1.1 di bawah ini:

Tabel 1.1 Masalah Lingkungan Hidup di Provinsi Lampung

No	Deskripsi Permasalahan	Lokasi
1.	Pencemaran oleh kendaraan bermotor	Lampung Tengah Bandar Lampung
2.	Pencemaran di Daerah Aliran Sungai (DAS) oleh industri	Lampung Tengah Lampung Utara Tulang Bawang
3.	Pencemaran laut	Bandar Lampung
4.	Pencemaran air oleh limbah rumah tangga/pasar	Perkotaan
5.	Kerusakan hutan mangrove/bakau	Pantai Timur
6.	Kerusakan pesisir pantai	Pantai Timur Tulang Bawang Pantai Barat
7.	Kerusakan terumbu karang	Pantai Timur Tulang Bawang Pantai Barat
8.	Pencemaran air tanah	Bandar Lampung
9.	Kerusakan lingkungan dari pertambangan dari golongan C dan Peti	Lampung Tengah Lampung Selatan Tanggamus
10.	Kerusakan DAS	Lampung Tengah Tanggamus
11.	Penebangan liar	Lampung Barat
12.	Lahan kritis	Bandar Lampung Lampung Tengah
13.	Kelangkaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Bandar Lampung
14.	Persampahan	Bandar Lampung
15.	Analisis Dampak Lingkungan (amdal)	Seluruh kabupaten/ kota di Lampung
16.	Banjir	Lampung Tengah Bandar Lampung

Sumber: Santoso, 2007.

Dalam rangka mengatasi masalah lingkungan hidup sebagaimana diuraikan pada tabel 1 diatas, Pemerintah pusat sudah menunjukkan komitmen dan perhatian serius melalui Undang-undang nomor 32 tahun 2009 pasal 44, 45 dan 46 tentang perundang-undangan dan anggaran berbasis lingkungan. Pemerintah pusat juga memberikan bantuan berupa Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan harapan Pemerintah Kabupaten/ Kota di Provinsi Lampung termotivasi untuk lebih perhatian dan meningkatkan komitmennya dalam pelestarian Lingkungan Hidup

melalui anggaran. Permen LH No 7 tahun 2014 tentang kerugian lingkungan hidup akibat pencemaran dan/kerusakan lingkungan hidup pada pasal 7 juga mengamanahkan bahwa, Instansi Lingkungan Hidup Daerah adalah instansi yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup di daerah. Alokasikan anggaran Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung dijelaskan pada tabel 2 berikut ini:

Tabel 1.2 Alokasi APBD Bidang Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2015

No	Kabupaten/ Kota	APBD
1	Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kota Bandar Lampung	Rp. 26.230.223.450
2	Kantor Lingkungan Hidup Kota Metro	Rp. 4.691.860.000
3	Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Lampung Selatan	Rp. 221.665.000
4	Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Utara	Rp. 3.686.503.550
5	Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah	Rp. 2.998.363.300
6	Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kebersihan Dan Pertamanan Kabupaten Tanggamus	Rp. 1.501.750.010
7	Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Timur	Rp. 6.771.040.000
8	Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kebersihan Dan Pertamanan Lampung Barat	Rp. 7.851.724.300
9	Pringsewu	Rp. 5.130.229.053
10	Tulang Bawang	Rp. 5.702.403.900
11	Tulang Bawang Barat	Rp. 4.727.548.646
12	Mesuji	Rp. 1.314.439.000
13	Way Kanan	Rp. 3.155.812.520
14	Pesawaran	Rp. 600.000.000
15	Pesisir Barat	Rp. 4.430.000.000

Sumber: LSLHD Kab./Kota di Provinsi Lampung

Sebagaimana terlihat pada tabel di atas, alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bidang lingkungan hidup di beberapa Kabupaten/Kota masih sangat minim, alokasi anggaran pun belum seutuhnya untuk kepentingan lingkungan hidup sehingga masalah lingkungan belum bisa sepenuhnya teratasi. Permasalahan ini diduga terjadi pada politik anggaran khususnya saat

mengalokasikan anggaran Berbasis Lingkungan Hidup dalam APBD Pemerintah/ Kota di Provinsi Lampung.

Beberapa permasalahan pada politik anggaran Bidang Lingkungan Hidup khususnya di Provinsi Lampung adalah:

1. Komitmen Pemerintah Daerah untuk memprioritaskan kepentingan lingkungan hidup dalam agenda kebijakan pembangunan masih sangat rendah sehingga implikasinya jumlah alokasi anggaran untuk urusan lingkungan hidup menjadi sangat minim.
2. Anggaran yang dialokasikan pun belum sepenuhnya untuk kepentingan lingkungan hidup sehingga upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup belum bisa tercapai sepenuhnya.

Permasalahan ini terjadi tidak terlepas dari persepsi Pemerintah Daerah tentang anggaran Berbasis Lingkungan Hidup. Persepsi yang dimaksud adalah sikap, norma subyektif, kendali perilaku yang di duga mempengaruhi niat Pemerintah Daerah pada saat mengalokasikan anggaran berbasis lingkungan hidup.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Persepsi Sikap, Norma Subyektif dan Kendali Perilaku Terhadap Niat Mengalokasikan Anggaran Berbasis Lingkungan Hidup Pada Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota di Provinsi Lampung.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah persepsi sikap mempengaruhi niat mengalokasikan anggaran berbasis lingkungan hidup pada Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota di Provinsi Lampung?
2. Apakah persepsi norma subyektif mempengaruhi niat mengalokasikan anggaran berbasis lingkungan hidup pada Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota di Provinsi Lampung?
3. Apakah kendali perilaku mempengaruhi niat mengalokasikan anggaran berbasis lingkungan hidup pada Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota di Provinsi Lampung?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh persepsi sikap terhadap niat mengalokasikan anggaran Berbasis Lingkungan Hidup pada Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota di Provinsi Lampung.
2. Untuk mengetahui pengaruh persepsi norma subyektif terhadap niat mengalokasikan anggaran Berbasis Lingkungan Hidup pada Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota di Provinsi Lampung.
3. Untuk mengetahui pengaruh persepsi kendali perilaku terhadap niat mengalokasikan anggaran Berbasis Lingkungan Hidup pada Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota di Provinsi Lampung.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dan landasan pemikiran bagi Pemerintah Daerah dalam membuat kebijakan anggaran Berbasis Lingkungan Hidup.
2. Bagi kalangan akademik, sebagai kontribusi untuk memperkaya khasanah keilmuan pada umumnya dan pengembangan penelitian sejenis pada masa yang akan datang.
3. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan bagi peneliti selanjutnya tentang anggaran Berbasis Lingkungan Hidup.

BAB II

KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Landasan Teori

2.1.1 *Theory of Planned Behavior (TPB)*

2.1.1.1 Sejarah Dan Pengembangan *Theory of Reasoned Action* dan *Theory of Planned Behavior*

Theory of Planned Behavior merupakan pengembangan dari *Theory of Reasoned Action* yang telah dikemukakan sebelumnya oleh Fishbein dan Ajzen pada tahun 1975. Dinamakan *reasoned action* karena teori ini ingin mengetahui latar belakang atau alasan (*reason*) dari sebuah tindakan (*action*).

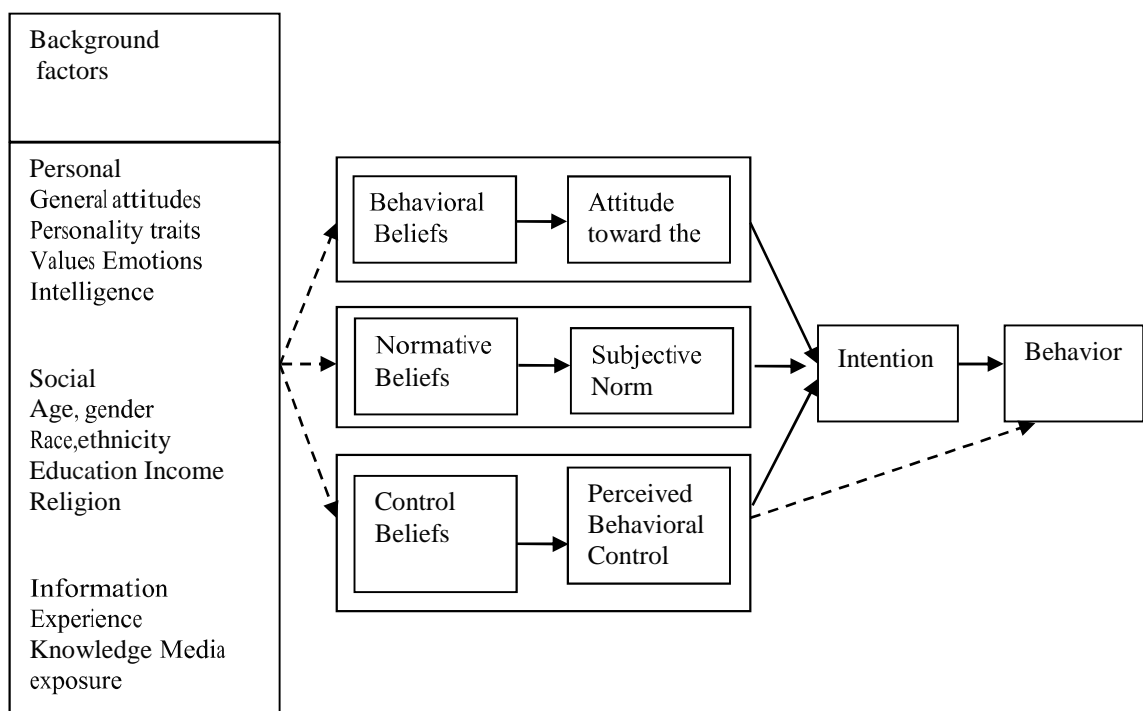
Fishbein dan Ajzen merasa perlu menyusun teori ini karena mereka melihat bahwa perubahan konsep sikap dalam kurun waktu empat dekade ditandai dengan kegagalan konsep-konsep tersebut untuk menunjukkan sikap sebagai alat utama menjelaskan dan memprediksi perilaku (Fishbein & Ajzen, 1975). Pada teori ini terdapat pemisahan empat variabel yaitu: keyakinan; sikap; intensi dan perilaku. Pemisahan keempat variabel diatas, menurut Fishbein dan Azjen (1975), dapat mengeliminasi berbagai ketidak konsistenan yang diakibatkan oleh ketidak seragaman fokus para peneliti terhadap sikap atau variabel yang berkaitan ketika meneliti masalah penelitian yang sama (Fishbein & Ajzen, 1975). Pada teori-teori terdahulu, sikap merupakan penentu (*antesenden*) langsung tingkah laku. Sedangkan dalam *Theory of Reasoned Action*, sikap bukanlah *antesenden* langsung dari tingkah laku. *Antesenden* langsung dari tingkah laku adalah intensi,

dan sikap berfungsi sebagai salah satu variabel penentu intensi (Fishbein & Ajzen 1975). Pendapat ini didukung oleh pendapat banyak ahli yang menyatakan bahwa intensi adalah faktor disposisi yang hubungannya paling dekat dengan kecenderungan untuk bertindak laku (Fishbein & Ajzen; Triandis; Fisher & Fisher; Gollwitzer; dalam Ajzen 2005). Ditambah lagi, banyak penelitian yang telah dilakukan semakin memperkuat validitas prediktif intensi terhadap tingkah laku (Ajzen, 2005).

Perubahan *Theory of Reasoned Action* menjadi *Theory Planned Behavior* disebabkan karena *Theory of Reasoned Action* hanya menjelaskan hubungan intensi dengan tingkah laku yang sepenuhnya berada dalam kontrol individu (*volitional behavior*). Sementara, menurut Ajzen tidak semua tingkah laku yang dilakukan oleh manusia berada di bawah kontrol dirinya. Ajzen menemukan bahwa ternyata kesuksesan individu untuk mempertahankan perilaku atau mencapai tujuan dari perilaku tidak hanya ditentukan oleh niat individu akan tetapi juga dipengaruhi faktor non motivasi, seperti adanya kesempatan dan sumber yang mendukung perilaku (Ajzen, 1988).

Theory of Planned Behavior didasarkan pada asumsi bahwa manusia biasanya akan bertindak laku sesuai dengan pertimbangan akal sehat, bahwa manusia akan mengambil informasi yang ada mengenai tingkah laku yang tersedia dan secara implisit atau eksplisit mempertimbangkan akibat dari tingkah laku tersebut. Menurut *Theory Of Planned Behavior*, intensi adalah fungsi dari tiga determinan dasar, yang bersifat personal, sosial, dan kontrol. Yang bersifat personal ialah

sikap, yang bersifat sosial disebut norma subjektif, dan yang bersifat kontrol disebut *Perceived Behavior Control* (PBC). Ketiga faktor tersebut adalah faktor penentu yang penting. Selain itu, bobot dari tiga faktor dapat bervariasi dari satu orang ke orang lain, atau dari satu populasi ke populasi lainnya. Gambar 2.1 adalah representasi grafis dari teori perilaku yang direncanakan:



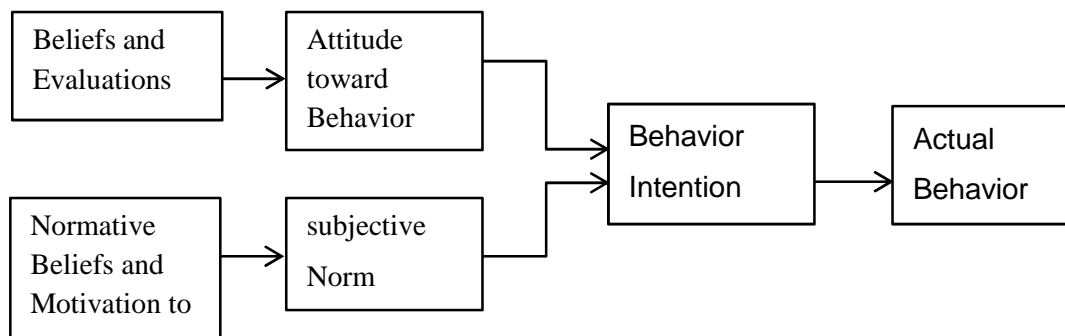
Sumber: Ajzen 2005 Teori Perilaku Direncanakan

Mahyarni Dalam Kajian Histori yang berjudul *Theory of Reasoned Action* dan *Theory of Planned Behavior* menyatakan teori ini awalnya dinamai *Theory of Reasoned Action* (TRA), dikembangkan tahun 1967, selanjutnya teori tersebut terus direvisi dan diperluas oleh Icek Ajzen dan Martin Fishbein. Mulai tahun 1980 teori tersebut digunakan untuk mempelajari perilaku manusia dan untuk mengembangkan intervensi-intervensi yang lebih mengena. Pada Tahun 1988, hal lain ditambahkan pada model *reasoned action* yang sudah ada tersebut dan

kemudian dinamai *Theory of Planned Behavior* (TPB), untuk mengatasi kekurangan yang ditemukan oleh Ajzen dan Fishbein melalui penelitian-penelitian mereka dengan menggunakan TRA.

Pada awal tahun 1960-an dan di awal 1970-an berkolaborasi dengan Ajzen dan Fishbein mengembangkan *Theory of Reasoned Action* dan *Theory of Planned Behavior*. Sebagaimana dijelaskan pada gambar 2.2 dibawah ini:

Gambar 2.2 berikut ini tentang teori tindakan beralasan:



Sumber: Fishbein dan Ajzen (1975) teori tindakan beralasan (*Theory of Reasoned Action*)

Teori Tindakan Beralasan dikembangkan untuk menguji hubungan antara sikap dan perilaku (Fishbein dan Ajzen 1975; Ajzen 1988; Werner 2004). Konsep utama dalam Teori Tindakan Beralasan adalah “prinsip- prinsip kompatibilitas” dan konsep “intensi perilaku,” (Fishbein dan Ajzen 1975; Ajzen 1988;). Prinsip kompatibilitas menetapkan dalam rangka untuk memprediksi satu perilaku tertentu diarahkan ke target tertentu dalam konteks dan waktu tertentu, sikap khusus yang sesuai dengan waktu, target dan konteks yang harus dinilai, (Fishbein dan Ajzen 1975; Ajzen 1988).

Konsep yang menyatakan keinginan perilaku yang memotivasi individu untuk terlibat dalam perilaku yang didefinisikan oleh sikap yang mempengaruhi perilaku, (Fishbein dan Ajzen 1975). Keinginan berperilaku menunjukkan berapa banyak usaha individu ingin berkomitmen untuk melakukan perilaku dengan komitmen yang lebih tinggi dengan kecenderungan perilaku itu akan dilakukan. Keinginan untuk berperilaku ditentukan oleh sikap dan norma subyektif (Fishbein dan Ajzen 1975; Ajzen 1988).

Sikap mengacu pada persepsi individu (baik menguntungkan atau tidak menguntungkan) terhadap perilaku tertentu, (Werner 2004). Norma subjektif mengacu pada penilaian subjektif individu tentang preferensi lain dan dukungan untuk berperilaku, (Werner 2004). *Theory of Reasoned Action* dikritik karena mengabaikan pentingnya faktor-faktor sosial yang dalam kehidupan nyata bisa menjadi penentu untuk perilaku individu, (Grandon dan Mykytyn 2004; Werner 2004). Faktor sosial berarti semua pengaruh lingkungan sekitarnya (seperti norma individu) yang dapat mempengaruhi perilaku individu, (Ajzen 1991).

Ajzen (1991) mengusulkan faktor tambahan dalam menentukan perilaku individu dalam teori perilaku yang direncanakan yaitu perilaku kontrol yang dirasakan. Perilaku kontrol yang dirasakan adalah persepsi individu pada betapa mudahnya perilaku tertentu akan dilakukan, (Ajzen 1991). Perilaku kontrol yang dirasakan secara tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku.

Penjelasan singkat dari teori perilaku direncanakan dapat digunakan untuk memprediksi apakah seseorang akan melakukan atau tidak melakukan suatu

perilaku. Teori perilaku direncanakan ini menggunakan tiga konstruk sebagai antecedent dari intensi, yaitu sikap kita terhadap perilaku tersebut, norma subjektif, dan perasaan kita mengenai kemampuan mengontrol segala sesuatu yang mempengaruhi apabila hendak melakukan perilaku tersebut.

2.1.2 Sikap

Ajzen (2005) mengatakan sikap merupakan suatu disposisi untuk merespon secara positif atau negatif suatu perilaku. Sikap terhadap perilaku ditentukan oleh *belief* (keyakinan) tentang konsekuensi dari sebuah perilaku, yang disebut sebagai *behavioral beliefs*. Keyakinan berkaitan dengan penilaian subjektif individu terhadap dunia sekitarnya, pemahaman individu mengenai diri dan lingkungannya, dilakukan dengan cara menghubungkan antara perilaku tertentu dengan berbagai manfaat atau kerugian yang mungkin diperoleh apabila individu melakukan atau tidak melakukannya. Keyakinan ini dapat memperkuat sikap terhadap perilaku itu apabila berdasarkan evaluasi yang dilakukan individu, diperoleh data bahwa perilaku itu dapat memberikan keuntungan baginya.

Secara umum, semakin individu memiliki evaluasi bahwa suatu perilaku akan menghasilkan konsekuensi positif maka individu akan cenderung bersikap *favorable* (baik) terhadap perilaku tersebut; sebaliknya, semakin individu memiliki evaluasi negative maka individu akan cenderung bersikap *unfavorable* (tidak baik) terhadap perilaku tersebut (Ajzen, 2005). Menurut Thurstone dalam Avin (2004), Sikap dipandang sebagai perasaan, baik memihak atau melawan suatu objek psikologis.

Karakteristik paling utama yang membedakan sikap dengan variabel lain adalah bahwa sikap bersifat evaluatif atau cenderung afektif (Fishbein & Ajzen, 1975). Afek merupakan bagian dari sikap yang paling penting, dimana afek mengacu pada perasaan dan penilaian seseorang akan objek, orang, permasalahan atau peristiwa tertentu (Fishbein & Ajzen, 1975). Ajzen (2005) menambahkan, sikap terhadap tingkah laku ditentukan oleh keyakinan (*belief*) akan akibat dari tingkah laku yang akan dilakukan.

Keyakinan ini disebut sebagai *Behavioral Belief*. Setiap *Behavioral Belief* menghubungkan tingkah laku dengan konsekuensi tertentu dari munculnya tingkah laku tersebut, atau kepada beberapa atribut lain seperti kerugian yang mungkin muncul ketika melakukan tingkah laku tersebut. Sebagai contoh adalah ketika seseorang meyakini bahwa menggunakan bus umum baik bagi lingkungan; namun ia menyadari bahwa ada konsekuensi jika ia melakukannya seperti, ia bisa mengeluarkan biaya yang lebih rendah, atau ia harus berdesak-desakan di dalam bus, dan harus mengantri untuk bisa naik bus umum. Hal – hal seperti biaya, kenyamanan, dan antri diatas adalah atribut yang mungkin muncul dari tingkah laku menggunakan bus umum.

Sikap staff pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak wajib pajak badan secara signifikan (Alvin, 2014). Sikap secara independen dan secara signifikan dapat memprediksi niat perempuan untuk melakukan deteksi dini kanker payudara dengan teknik pemeriksaan payudara sendiri (Anwar dan Arum, 2010).

Menunjukkan sikap memiliki pengaruh yang signifikan terhadap niat *whistle*

blowing internal dan dirasakan dukungan organisasi memiliki pengaruh yang signifikan sebagai variabel moderating (Saud, 2016).

2.1.3 Norma Subjektif

Ajzen (2005) mengatakan Norma Subjektif, determinan kedua dari intensi dalam *theory of planned behavior*, juga diasumsikan sebagai fungsi dari keyakinan (*belief*), tetapi keyakinan dalam bentuk yang berbeda. Yaitu keyakinan seseorang bahwa individu atau kelompok tertentu setuju atau tidak menyetujui, terlibat atau tidak terlibat bila dirinya menampilkan atau memunculkan tingkah laku tertentu. Individu dan kelompok diatas disebut juga *Referent*. *Referent* adalah orang atau kelompok sosial yang berpengaruh bagi individu, baik itu orang tua, pasangan (suami/istri), teman dekat, rekan kerja atau yang lain tergantung pada tingkah laku yang terlibat (*significant others*). Keyakinan yang mendasari norma subjektif ini disebut dengan istilah *normative belief*.

Norma subjektif didefinisikan sebagai persepsi individu tentang tekanan sosial untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku (Ajzen 2005). Norma subjektif ditentukan oleh kombinasi antara *normative belief* individu dan *motivation to comply*. Biasanya semakin individu mempersepsikan bahwa *social referent* yang mereka miliki mendukung mereka untuk melakukan suatu perilaku maka individu tersebut akan cenderung merasakan tekanan sosial untuk memunculkan perilaku tersebut. Dan sebaliknya semakin individu mempersepsikan bahwa *social referent* yang mereka miliki tidak menyetujui suatu

perilaku maka individu cenderung merasakan tekanan sosial untuk tidak melakukan perilaku tersebut.

Norma subyektif berpengaruh positif terhadap minat konsumen pengguna refill tinta printer data print (Imelda, et al 2014). Norma subyektif berpengaruh positif terhadap minat konsumen pengguna refill tinta printer data print (Imelda, et al 2014). Norma subjektif saja tidak signifikan mampu memprediksi niat (Anwar dan Arum, 2010).

2.1.4 Kendali Perilaku

Ajzen (2005) menjelaskan *perceived behavioral control* sebagai fungsi yang didasarkan oleh *belief* yang disebut sebagai *control beliefs*, yaitu *belief* individu mengenai ada atau tidak adanya faktor yang mendukung atau menghalangi individu untuk memunculkan sebuah perilaku. *Belief* ini didasarkan pada pengalaman terdahulu individu tentang suatu perilaku, informasi yang dimiliki individu tentang suatu perilaku yang diperoleh dengan melakukan observasi pada pengetahuan yang dimiliki diri maupun orang lain yang dikenal individu, dan juga oleh berbagai faktor lain yang dapat meningkatkan ataupun menurunkan perasaan individu mengenai tingkat kesulitan dalam melakukan suatu perilaku.

Semakin individu merasakan banyak faktor pendukung dan sedikit faktor penghambat untuk dapat melakukan suatu perilaku, maka lebih besar kendali yang mereka rasakan atas perilaku tersebut dan begitu juga sebaliknya, semakin sedikit individu merasakan faktor pendukung dan banyak faktor penghambat untuk dapat

melakukan suatu perilaku, maka individu akan cenderung mempersepsikan diri sulit untuk melakukan perilaku tersebut. Dalam TPB, Ajzen (2005) mengemukakan bahwa persepsi kontrol perilaku ditentukan oleh keyakinan individu mengenai ketersediaan sumberdaya berupa peralatan, kompatibilitas, kompetensi, dan kesempatan (*control belief strength*) yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan diprediksi dan besarnya peran sumber daya tersebut (*power of control factor*) dalam mewujudkan perilaku tersebut. Secara spesifik, dalam *planned behavior theory*, persepsi tentang kendali perilaku (*perceived behavioral control*) didefinisikan sebagai persepsi individu mengenai kemudahan atau kesulitan untuk melakukan suatu perilaku (Ajzen, 2005).

Kontrol keperilakuan yang dipersepsikan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak wajib pajak badan secara signifikan (Alvin, 2014). Persepsi kontrol keperilakuan berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat menjadi wirausaha (Mirawati, et al 2016). Dirasakan kontrol perilaku (PBC) secara independen dan secara signifikan dapat memprediksi niat perempuan untuk melakukan kanker payudara deteksi dini dengan teknik pemeriksaan payudara sendiri (Anwar dan Arum 2010).

2.1.5 Niat mengalokasikan Anggaran Berbasis Lingkungan Hidup

Niat/ intensi merupakan indikasi seberapa keras orang mau berusaha untuk mencoba dan berapa besar usaha yang akan dikeluarkan individu untuk melakukan suatu perilaku (Fishbein & Ajzen, 1975) . Niat merupakan variabel antara yang menyebabkan terjadinya perilaku dari suatu sikap maupun variabel

lainnya. Niat menunjukkan seberapa keras seseorang berani mencoba (Dharmmesta, 1998). Selanjutnya ada beberapa hal yang harus difahami hubungannya dengan niat, yaitu:

- a. Niat dianggap sebagai penangkap atau antara faktor-faktor motivasional yang mempunyai dampak pada perilaku.
- b. Niat menunjukkan seberapa keras seseorang berani mencoba.
- c. Niat juga menunjukkan seberapa banyak upaya yang direncanakan seseorang untuk melakukan.
- d. Niat adalah yang paling berhubungan dengan perilaku berikutnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 pasal 44 menyatakan bahwa setiap penyusunan peraturan perundang-undangan pada tingkat nasional dan daerah wajib memperhatikan perlindungan fungsi lingkungan hidup dan prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini. Selanjutnya pada pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang anggaran berbasis lingkungan hidup menyatakan bahwa, Pemerintah dan dewan perwakilan rakyat republik indonesia serta pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah wajib mengalokasikan anggaran yang memadai untuk membiayai:

- a. Kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
- b. Program pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, dalam rangka pemulihan kondisi lingkungan hidup yang kualitasnya telah mengalami pencemaran dan/atau kerusakan pada saat undang-undang ini ditetapkan pemerintah dan pemerintah

daerah wajib mengalokasikan anggaran untuk pemulihan lingkungan hidup (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 pasal 46). Jadi dapat dikatakan anggaran berbasis lingkungan hidup adalah anggaran yang dialokasikan untuk membiayai kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup serta pemulihan lingkungan hidup.

Dari uraian tentang niat dan anggaran berbasis lingkungan hidup tersebut diatas, maka dapat di katakan niat mengalokasikan berbasis lingkungan hidup adalah seberapa keras pemerintah daerah mau berusaha untuk mencoba dan berapa besar usaha yang akan dikeluarkan untuk mengalokasikan anggaran berbasis lingkungan hidup.

2.1.6 Penelitian Terdahulu terdapat pada tabel 3 sebagai berikut:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Alvin, 2014	Pengaruh Sikap, Norma Subyektif, Dan Kontrol Perilaku Yang Dipersepsikan Staff Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Badan	Sikap Staff Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Badan Secara Signifikan Norma Subyektif Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Badan Secara Signifikan Kontrol Perilaku Yang Dipersepsikan Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Badan Secara Signifikan.
2	Imelda, et al, 2014	Pengaruh Sikap Dan Norma Subyektif Terhadap Minat Konsumen (Studi Pada Pengguna Refill Tinta Printer Data print Di Banjarmasin	Sikap berpengaruh positif Terhadap Minat Konsumen Pengguna Refill Tinta Printer Dataprint, Norma subyektif berpengaruh positif Terhadap Minat Konsumen Pengguna Refill Tinta Printer Data print

3	Mirawati, et al 2016	Pengaruh Sikap, Norma Subjektif, Dan Persepsi Kontrol Keperilakuan, Terhadap Niat Siswa Smk Di Kota Denpasar Untuk Menjadi Wirausaha	Sikap Berwirausaha, Norma Subjektif, Dan Persepsi Kontrol Keperilakuan Berpengaruh Positif Dan Signifikan Terhadap Niat Menjadi Wirausaha.
4	Meilisha Djati Arum dan A. Anwar Prabu Mangkunegara, 2010	Peran Sikap, Norma Subjektif, dan Persepsi Kendali Perilaku Dalam Memprediksi Intensi Wanita Melakukan Pemeriksaan Payudara Sendiri	a) sikap, norma subjektif dan dirasakan kontrol perilaku (PBC) adalah interaktif berpengaruh untuk prediksi niat; b) sikap dan dirasakan kontrol perilaku (PBC) secara independen dan secara signifikan dapat memprediksi niat; dan c) norma subjektif saja tidak signifikan mampu memprediksi niat.
5	Ilham Maulana Saud, 2016	Pengaruh Sikap dan Persepsi Kontrol Perilaku Terhadap Niat Whistleblowing Internal-Eksternal dengan Persepsi Dukungan Organisasi Sebagai Variabel Pemoderasi	Hasil menunjukkan sikap memiliki pengaruh yang signifikan terhadap niat whistleblowing internal dan dirasakan dukungan organisasi memiliki pengaruh yang signifikan sebagai variabel moderating yang memperkuat pengaruh kontrol perilaku yang dirasakan terhadap niat whistleblowing internal- eksternal.
6	Burhanudin, 2015	Aplikasi Theory of Planned Behavior Pada Intensi Mahasiswa Untuk Berwirausaha	Menunjukkan bahwa 43,3% dari variasi niat untuk menjadi pengusaha dijelaskan oleh variabel sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan dirasakan kontrol perilaku. Adapun sisa 56,7% dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian ini.
7.	Nur Hadiati Endah , 2014	Perilaku Pembelian Kosmetik Berlabel Halal Oleh Konsumen Indonesia	Hasil penelitian ini menemukan bahwa tiga anteseden dari intensi yaitu sikap, norma subjektif dan persepsi kendali perilaku memiliki pengaruh yang positif terhadap intensi konsumen untuk membeli kosmetik halal.

2.2 Kerangka Konsep

Menurut *Theory of Reasoned Action*, sikap bukanlah antesenden langsung dari tingkah laku. Antesenden langsung dari tingkah laku adalah intensi, dan sikap berfungsi sebagai salah satu variabel penentu intensi (Fishbein & Ajzen 1975). Pendapat ini didukung oleh pendapat banyak ahli yang menyatakan bahwa intensi adalah faktor disposisi yang hubungannya paling dekat dengan kecenderungan untuk bertingkah laku (Fishbein & Ajzen; Triandis; Fisher & Fisher; Gollwitzer; dalam Ajzen 2005). Ditambah lagi, banyak penelitian yang telah dilakukan semakin memperkuat validitas prediktif intensi terhadap tingkah laku (Ajzen, 2005).

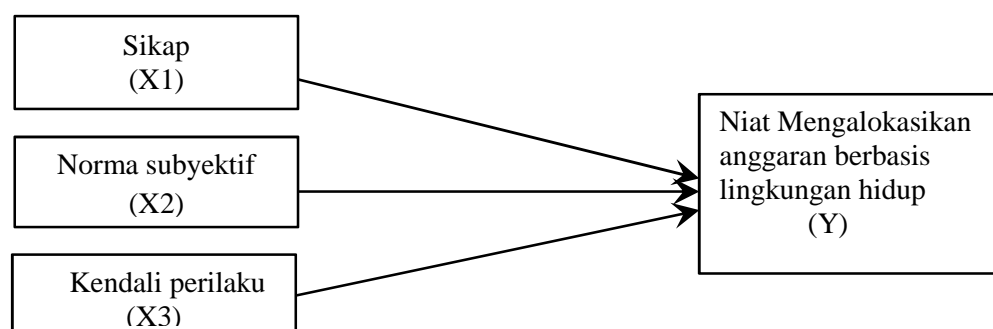
Norma subjektif didefinisikan sebagai persepsi individu tentang tekanan sosial untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku (Ajzen, 2005). Biasanya semakin individu mempersepsikan bahwa *social referent* yang mereka miliki mendukung mereka untuk melakukan suatu perilaku maka individu tersebut akan cenderung merasakan tekanan sosial untuk memunculkan perilaku tersebut. Dan sebaliknya semakin individu mempersepsikan bahwa *social referent* yang mereka miliki tidak menyetujui suatu perilaku maka individu cenderung merasakan tekanan sosial untuk tidak melakukan perilaku tersebut.

Ajzen (2005) menjelaskan *perceived behavioral control* sebagai fungsi yang didasarkan oleh *belief* yang disebut sebagai *control beliefs*, yaitu *belief* individu mengenai ada atau tidak adanya faktor yang mendukung atau menghalangi individu untuk memunculkan sebuah perilaku. Semakin individu merasakan

banyak faktor pendukung dan sedikit faktor penghambat untuk dapat melakukan suatu perilaku, maka lebih besar kendali yang mereka rasakan atas perilaku tersebut dan begitu juga sebaliknya.

Menurut *Theory Of Planned Behavior*, intensi adalah fungsi dari tiga determinan dasar, yang bersifat personal, sosial, dan kontrol. Yang bersifat personal ialah sikap, yang bersifat sosial disebut norma subjektif, dan yang bersifat kontrol disebut *Perceived Behavior Control* (PBC). Ketiga faktor tersebut adalah faktor penentu yang penting. Selain itu, bobot dari tiga faktor dapat bervariasi dari satu orang ke orang lain, atau dari satu populasi ke populasi lainnya.

Penjelasan singkat dari teori perilaku direncanakan dapat digunakan untuk memprediksi apakah seseorang akan melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku. Teori perilaku direncanakan ini menggunakan tiga konstruk sebagai anteseden dari intensi, yaitu sikap kita terhadap perilaku tersebut, norma subjektif, dan perasaan kita mengenai kemampuan mengontrol segala sesuatu yang mempengaruhi apabila hendak melakukan perilaku tersebut (kendali perilaku). Berdasarkan uraian diatas, maka dapat digambarkan kerangka konsep penelitian ini sebagai berikut:



Gambar 2.3 Kerangka Konsep Penelitian

Berdasarkan kerangka konsep diatas dapat dijelaskan arah tanda panah menunjukkan bahwa variabel persepsi sikap (X_1) mempengaruhi niat mengalokasikan anggaran berbasis lingkungan hidup, Persepsi norma subyektif (X_2) mempengaruhi niat mengalokasikan anggaran berbasis lingkungan hidup, persepsi kendali perilaku (X_3) mempengaruhi niat mengalokasikan anggaran berbasis lingkungan hidup.

2.3 Pengembangan Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara yang perlu dibuktikan kebenarannya secara statistik. Penelitian ini ingin membuktikan persepsi sikap, norma subyektif dan kendali perilaku yang diduga berpengaruh positif terhadap Niat Mengalokasikan anggaran berbasis lingkungan hidup pada Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota di Provinsi Lampung. Perumusan hipotesis penelitian berdasarkan urutan-urutan variabel adalah sebagai berikut:

2.3.1 Pengaruh persepsi sikap terhadap niat mengalokasikan anggaran berbasis lingkungan hidup pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.

Ajzen (2005) mengatakan sikap merupakan suatu disposisi untuk merespon secara positif atau negatif suatu perilaku. Sikap terhadap perilaku ditentukan oleh *belief* tentang konsekuensi dari sebuah perilaku, yang disebut sebagai *behavioral beliefs* (Ajzen, 2005). Menurut Ajzen (2005) setiap *behavioral beliefs* menghubungkan perilaku dengan hasil yang bisa didapat dari perilaku tersebut. Sikap terhadap perilaku ditentukan oleh evaluasi individu mengenai hasil yang berhubungan

dengan perilaku dan dengan kekuatan hubungan dari kedua hal tersebut (Ajzen, 2005).

Secara umum, semakin individu memiliki evaluasi bahwa suatu perilaku akan menghasilkan konsekuensi positif maka individu akan cenderung bersikap *favorable* terhadap perilaku tersebut; sebaliknya, semakin individu memiliki evaluasi negative maka individu akan cenderung bersikap *unfavorable* terhadap perilaku tersebut (Ajzen, 2005). Sikap staff pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak wajib pajak badan secara signifikan (Alvin, 2014).

Berdasarkan uraian diatas maka penulis menduga terdapat pengaruh positif antara Sikap terhadap niat mengalokasikan anggaran berbasis lingkungan hidup pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, Sehingga penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H1: Persepsi sikap berpengaruh positif terhadap niat mengalokasikan anggaran berbasis lingkungan hidup Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.

2.3.2 Pengaruh persepsi Norma Subyektif terhadap niat mengalokasikan anggaran berbasis lingkungan hidup Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.

Ajzen (2005) mengatakan norma subjektif merupakan fungsi yang didasarkan oleh *belief* yang disebut *normative belief*, yaitu *belief* mengenai kesetujuan dan atau ketidaksetujuan yang berasal dari *referent* atau orang dan kelompok yang berpengaruh bagi individu (*significant others*) seperti orang tua, pasangan, teman dekat, rekan kerja atau lainnya terhadap suatu perilaku. Norma subjektif

didefinisikan sebagai persepsi individu tentang tekanan sosial untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku (Ajzen, 2005).

Norma subjektif ditentukan oleh kombinasi antara *normative belief* individu dan *motivation to comply*. Biasanya semakin individu mempersepsikan bahwa *social referent* yang mereka miliki mendukung mereka untuk melakukan suatu perilaku maka individu tersebut akan cenderung merasakan tekanan sosial untuk memunculkan perilaku tersebut. Dan sebaliknya semakin individu mempersepsikan bahwa *social referent* yang mereka miliki tidak menyetujui suatu perilaku maka individu cenderung merasakan tekanan sosial untuk tidak melakukan perilaku tersebut. Norma subyektif berpengaruh positif terhadap minat konsumen pengguna refill tinta printer data print (Imelda, et al 2014).

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka penulis menduga terdapat pengaruh positif antara norma subyektif terhadap niat mengalokasikan anggaran berbasis lingkungan hidup pada Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota di Provinsi Lampung sehingga penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H2: Persepsi norma subyektif berpengaruh positif terhadap niat
mengalokasikan anggaran berbasis lingkungan hidup Pada Pemerintah
Daerah Kabupaten/ Kota di Provinsi Lampung.

2.3.3 Pengaruh Persepsi Kendali Perilaku terhadap niat mengalokasikan anggaran berbasis lingkungan hidup Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.

Ajzen (2005) menjelaskan *perceived behavioral control* sebagai fungsi yang didasarkan oleh *belief* yang disebut sebagai *control beliefs*, yaitu *belief* individu mengenai ada atau tidak adanya faktor yang mendukung atau menghalangi individu untuk memunculkan sebuah perilaku. *Belief* ini didasarkan pada pengalaman terdahulu individu tentang suatu perilaku, informasi yang dimiliki individu tentang suatu perilaku yang diperoleh dengan melakukan observasi pada pengetahuan yang dimiliki diri maupun orang lain yang dikenal individu, dan juga oleh berbagai faktor lain yang dapat meningkatkan ataupun menurunkan perasaan individu mengenai tingkat kesulitan dalam melakukan suatu perilaku.

Semakin individu merasakan banyak faktor pendukung dan sedikit faktor penghambat untuk dapat melakukan suatu perilaku, maka lebih besar kontrol yang mereka rasakan atas perilaku tersebut dan begitu juga sebaliknya, semakin sedikit individu merasakan faktor pendukung dan banyak faktor penghambat untuk dapat melakukan suatu perilaku, maka individu akan cenderung mempersepsikan diri sulit untuk melakukan perilaku tersebut (Ajzen, 2005).

Kontrol keperilakuan yang dipersepsikan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak wajib pajak badan secara signifikan (Alvin, 2014). Persepsi kontrol keperilakuan berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat menjadi wirausaha (Mirawati, et al 2016).

Berdasarkan uraian diatas maka penulis menduga terdapat pengaruh positif antara kendali perilaku terhadap niat mengalokasikan anggaran berbasis lingkungan hidup Pada Pemerintah Kabupaten/ Kota di Provinsi Lampung, Sehingga penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H3: Persepsi kendali perilaku berpengaruh positif terhadap niat mengalokasikan anggaran berbasis lingkungan hidup Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota di Provinsi Lampung.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlibat langsung dalam mengalokasikan anggaran berbasis lingkungan hidup dan yang bertugas di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung yang mempunyai tugas dan *job description* yaitu melakukan alokasi anggaran berbasis lingkungan hidup berjumlah 104 orang. Dari jumlah populasi penelitian sebanyak 104 orang tersebut, Penulismenjadikanseluruhpopulasimenjadirespondendalam penelitian ini atau yang disebut *total responden*.

3.2 Data Penelitian

3.2.1 Jenis Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang dilaksanakan dalam bentuk survei dengan menggunakan pendekatan *explanatory research* yaitu penelitian yang menjelaskan hubungan antar variabel-variabel melalui pengujian hipotesa (Singarimbun, 1996). *Explanatory research* untuk menganalisis pengaruh antar variabel independen yaitu pengaruh persepsi sikap, norma subyektif dan kendali perilaku serta variabel dependen yaitu niat mengalokasikan anggaran berbasis lingkungan hidup pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.

3.2.2 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara mendatangi langsung langsung responden yang berada di 16 pemerintah daerah seProvinsi Lampung dengan menggunakan daftar pertanyaan (*questionnaire*). Kuesioner yang digunakan mengadopsi dari penelitian Neila Ramdhani, 2011 dan penelitian Nur Hadiati Endah , 2014 dengan beberapa penyesuaian aitem pernyataan.

3.3 Definisi Operasional Variabel

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel independen dan variabel dependen. Variabel Independen terdiri dari sikap, norma subyektif dan kendali perilaku, Sedangkan variabel dependen adalah niat mengalokasikan anggaran berbasis lingkungan hidup pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.

Tabel 3.1 Operasional Variabel

Variabel	Definisi	Indikator	Skala Pengukuran
Sikap (X ₁)	Sikap merupakan suatu disposisi untuk merespon secara positif atau negatif suatu perilaku yang ditentukan oleh keyakinan akan manfaat kebaikan atau kerugiannya. (Ajzen 2005 dalam Ramdhani 2011)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keyakinan mendapatkan manfaat dari mengalokasikan anggaran berbasis Lingkungan Hidup. 2. Keyakinan mendapatkan kerugian dari mengalokasikan anggaran berbasis lingkungan hidup. 	Ordinal

Norma Subyektif (X ₂)	Norma subjektif Merupakan persepsi individu tentang tekanan sosial yang diperoleh dari keyakinan atas Pandangan Orang lain (normative belief individu) dan Adanya Motivasi untuk patuh (motivation to injunctive) untuk melakukan atau tidak melakukan. (Ajzen, 2005 dalam Ramdhani 2011).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya masukan berupa ide atau gagasan dari keluarga, teman, rekan kerja, orang terdekat tentang mengalokasian anggaran berbasis Lingkungan Hidup. 2. Adanya motivasi untuk patuh terhadap tuntutan untuk mengalokasikan anggaran berbasis Lingkungan Hidup 	Ordinal
Persepsi Kendali Prilaku (X ₃)	Kendali perilaku (perceived behavioral control) merupakan persepsi individu mengenai kemudahan atau kesulitan untuk melakukan suatu perilaku yang ditentukan oleh keyakinan individu mengenai ketersediaan sumberdaya. (Ajzen, 2005 dalam Ramdhani 2011).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki keyakinan akan ketersediaan sumberdaya yang mendukung mengalokasi anggaran berbasis lingkungan hidup. 2. Memiliki keyakinan akan ketersediaan kesempatan yang mendukung mengalokasi anggaran berbasis lingkungan hidup. 	Ordinal
Niat (Y)	Niat/intensi merupakan indikasi seberapa keras orang mau berusaha untuk mencoba dan berapa besar usaha yang akan dikeluarkan individu untuk melakukan suatu perilaku (Fishbein & Ajzen, 1975) .	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kecendrungan individu untuk bertindak Mengalokasikan Anggaran Berbasis Lingkungan Hidup. 2. Keputusan Individu untuk Mengalokasikan Anggaran Berbasis Lingkungan Hidup 	Ordinal

Pengukuran persepsi sikap, persepsi norma subyektif, persepsi kendali perilaku dan niat mengalokasikan anggaran berbasis lingkungan hidup menggunakan skala *likert* dengan alternatif jawaban skor yang sama yaitu 4 = Sangat setuju(SS), 3 = Setuju (S), 2 = Tidak setuju (TS), 1 = Sangat tidak setuju (STS).Skor 1-4 digunakan untuk melihat jawaban responden kearah setuju atau tidak setuju dan menghindari bias dalam jawaban, penulis tidak menggunakan jawaban tengah atau netral. Kemungkinan responden memilih jawaban kategori tengah (netral) karena tidak memiliki sikap atau pendapat, belum memberikan sikap atau pendapat yang jelas (Shaw dan Wright1967; Widhiarso 2010).

Menurut Tatang M. Amirin (2010), skala Likert suka disebut skala sikap, skala tentang sikap, yaitu sikap setuju dan tidak setuju terhadap sesuatu, skala Likert ada kalanya menghilangkan tengah-tengah kutub setuju dan tidak setuju (netral). Pertanyaan dibuat demikian agar orang berpendapat dan tidak bersikap netral atau tidak berpendapat.

Metode Analisis Data

3.3.1 Uji Validitas

Uji validitas dilakukan untuk mengukur sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam mengukur suatu data. Untuk mengetahui valid atau tidaknya dilakukan uji coba. Sugiyono(2016), mengatakan bahwa instrument dikatakan valid apabila instrument tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Demikian juga kuesioner sebagai alat ukur harus mengukur apa yang harus diukur.

Uji validitas instrumen dilakukan di Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung pada SKPD yang terlibat langsung mengalokasikan anggaran berbasis lingkungan hidup dengan jumlah responden sebanyak 15 orang. Uji validitas dengan menggunakan rumus *Pearson Product Moment* : (Hidayat, 2007).

3.3.2 Uji Reliabilitas

Setelah semua dinyatakan valid, analisis dilanjutkan dengan uji reliabilitas. Pernyataan dikatakan *reliable* jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Dalam penelitian ini teknik untuk menghitung indeks reliabilitas adalah menggunakan metode *Cronbach's Alpha*, yaitu menganalisis reliabilitas alat ukur dari satu kali pengukuran, dengan ketentuan bilangan hitung $> 0,600$ maka dinyatakan *reliable*, dan bilangan hitung $< 0,600$ maka dinyatakan tidak *reliable*.

3.3.3 Uji Hipotesis

Analisis regresi linear berganda dilakukan untuk mengetahui pengaruh tiap variabel independen terhadap variabel dependen. Persamaan regresi untuk menguji hipotesis-hipotesis yang diajukan dinyatakan dengan model sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan:

Y = Niat Mengalokasikan Anggaran Berbasis Lingkungan
 = Konstanta

$\beta_1 \beta_2 \beta_3$	=	Koefisien regresi
X_1	=	Persepsi Sikap
X_2	=	Persepsi Norma Subyektif
X_3	=	Persepsi Kendali Perilaku
e	=	<i>Error</i>

Sementara itu langkah-langkah untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen adalah dengan uji koefisien determinasi (R^2), Uji-t dan

Uji F.

3.3.3.1 Nilai R^2 (Koefisien Determinan)

Koefisien determinan digunakan untuk mengetahui berapa % pengaruh variabel bebas (X) yang dimasukkan dalam model mempengaruhi variabel terikat (Y), sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel bebas (X) yang tidak dimasukkan ke dalam model, dianggap baik apabila koefisien determinasi sama dengan atau mendekati satu (Ghozali, 2007).

Pedoman untuk memberikan interpretasi atas koefisien korelasi yang diperoleh adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2 Interpretasi Koefisien Korelasi

Interval Koefisien	Tingkat Pengaruh
0,000 – 0,199	Sangat Rendah
0,200 – 0,399	Rendah
0,400 – 0,599	Sedang
0,600 – 0,799	Kuat
0,800 – 1,000	Sangat Kuat

(Sugiyono, 2016 : 231)

3.3.3.2 Uji t

Uji *t*

ditujukan untuk melihat signifikansi dari pengaruh variabel independen secara individual terhadap variabel dependen. Ketentuan penerimaan atau penolakan hipotesis H_0 adalah sebagai berikut:

Jika :signifikansi ($p < \alpha$, $\alpha = 5\%$, maka H_0 : ditolak) signifikansi ($p > \alpha$, $\alpha = 5\%$, maka H_0 : diterima), p (probabilitas) = t Jika H_0 ditolak,

berarti dengan tingkat kepercayaan tertentu (5%), variabel independen yang diuji berpengaruh terhadap variabel dependen.

3.3.3.3 Uji F

Uji *F*

ditujukan untuk melihat signifikansi dari pengaruh variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen. Ketentuan penerimaan atau penolakan hipotesis H_0 adalah sebagai berikut:

Jika: signifikansi ($p < \alpha$, $\alpha = 5\%$, maka H_0 : ditolak) signifikansi ($p > \alpha$, $\alpha = 5\%$, maka H_0 : diterima), disini p (probabilitas) = F dan Jika: H_0 ditolak,

berarti dengan tingkat kepercayaan tertentu (5%),

variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh persepsi sikap, persepsi norma subyektif dan persepsi kendali perilaku terhadap niat mengalokasikan anggaran berbasis lingkungan hidup Kabupaten/kota di Provinsi Lampung. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa :

1. Persepsi sikap berpengaruh positif terhadap niat mengalokasikan anggaran berbasis lingkungan hidup, ini berarti Pemerintah daerah yakin bahwa dengan mengalokasikan anggaran berbasis lingkungan hidup akan bermanfaat pada pemerintah daerah kabupaten/kota, provinsi Lampung.
2. Persepsi Norma Subyektif berpengaruh positif terhadap niat mengalokasikan anggaran berbasis lingkungan hidup. Ini berarti Pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran berbasis lingkungan hidup perlu saran, masukan masyarakat agar anggaran tepat sasaran.
3. Persepsi Kendali Perilaku berpengaruh positif terhadap niat mengalokasikan anggaran berbasis lingkungan hidup. Ini berarti pemerintah daerah perlu meningkatkan Sumberdaya, berupa fasilitas pendukung , kompetensi dan kesempatan kepada aparatur pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran berbasis lingkungan hidup sehingga anggaran tersebut berpihak kepada kepentingan lingkungan hidup.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini mempunyai keterbatasan sebagai berikut :

1. Penelitian ini hanya dilakukan pada Dinas lingkungan hidup Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, oleh karena itu penelitian belum bisa di generalisir.
2. Penelitian ini Hanya dilakukan pada Pemerintah Daerah (PEMDA), bagi peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian juga pada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang juga bertanggung jawab dalam keputusan alokasi anggaran.
3. Terdapat beberapa pertanyaan yang mungkin mempunyai maksud yang sama sehingga dapat menimbulkan jawaban yang bias. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan lebih cermat dalam menyusun item-item pernyataan.
4. Skala yang digunakan adalah skala *Likert* dengan kategori respons 1-4 atau tidak menggunakan opsi tengah, kelemahannya adalah bahwa responden dipaksa untuk menjawab atau menentukan sikap sehingga ada kemungkinan bukan jawaban yang sebenarnya (Kloper1980;Widhiarso 2010)

5.3 Saran

1. Diharapkan bagi ASN yang bertugas di lingkungan hidup kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, terutama pejabat yang bertugas atau yang terlibat langsung dalam mengalokasikan anggaran agar lebih memprioritaskan anggaran berbasis lingkungan hidup.
2. Bagi pemerintah daerah diharapkan pada saat mengalokasikan anggaran lebih mengutamakan kegiatan yang melibatkan masyarakat dan lebih intensif dalam melakukan pendekatan melalui sosialisasi agar pemahaman masyarakat tentang pentingnya lingkungan hidup semakin meningkat.
3. Perlu mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya dan sarana prasarana guna mendukung tugas intansi bidang lingkungan hidup dalam rangka mengalokasikan anggaran berbasis lingkungan hidup untuk kepentingan lingkungan hidup sekarang dan yang akan datang.
4. Niat ASN dalam mengalokasikan anggaran berbasis lingkungan hidup perlu dukungan penuh dari pemerintah daerah supaya tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bisa tercapai secara maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. and Fishbein, M. 1980. *Understanding attitudes and predicting social behavior*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice.Hall.
- Ajzen, I. 1988. Attitudes, traits, and actions: Dispositional prediction of behavior in personality and social psychology. In L. Berkowitz (Ed), *Advances in experimental social psychology*, New York: Academic Press, Vol. 20, pp. 1-63.
- Ajzen, Icek. 1991. *The Theory of Planned Behavior*. Organizational Behavior and Human Decision Processes. Vol. 50. No. 2: 179- 211.
- Ajzen, I. 2005. *Attitude, Personality, and Behavior*. 2nd Edition. Berkshire, UK Open University Press-McGraw Hill Education.
- Azwar, Saifuddin, 1995. *Sikap Manusia, Teori dan Pengukurannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Alvin, 2014. Pengaruh Sikap, Norma Subyektif, Dan Kontrol Perilaku Yang Dipersepsikan Staff Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Badan. *Tax & Accounting Review*, Vol. 4, No.1.
- Burhanudin, 2015. Aplikasi Theory of Planned Behavior Pada Intensi Mahasiswa Untuk Berwirausaha Jurnal. *Bisnis dan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Janabadra* Vol. 6, No 1, hal 60 – 72.
- Dharmmesta, B.S. 1998, *Teory Of Planned Behavior Dalam Penelitian Sikap, Niat dan Perilaku Konsumen*, Jurnal Kelola. No. 18/VII/1998.
- Data & Informasi Lingkungan Hidup Sumatera 2013 Pusat Pengelolaan Ekoregion Sumatera *Kementerian Lingkungan Hidup* ppesumatera.menlh.go.id/datin/status_lingk/status_lingk_p/9.
- Fishbein, M., and Ajzen, I. 1975. *Belief, attitude, intention, and behavior: An introduction to theory and research*, Reading, MA: Addison.Wesley.
- Hartono, J. 2007. *sistem Informasi Keperilakuan*, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Imelda, Rofi'i dan Huwaida, 2014. Pengaruh Sikap Dan Norma Subyektif Terhadap Minat Konsumen SMART – *Study & Management Research*. Vol XI, No.2 – 2014. ISSN : 1693-4474

- Indeks kualitas lingkungan hidup 2014* Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan www.menlhk.go.id/iklh2014.
- Ilham Maulana Saud, 2016. Pengaruh Sikap dan Persepsi Kontrol Perilaku Terhadap Niat Whistleblowing Internal-Eksternal dengan Persepsi Dukungan Organisasi Sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Akuntansi dan Investasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta* Vol. 17 No. 2, Hlm: 209-219, Juli 2016.
- Mahyarni, 2013. Theory of Reasoned Action dan Theory of Planned Behavior, Sebuah Kajian Historis tentang Perilaku <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/elriyasah/article/view/17/13> Vol 4, No 1 2013.
- Mirawati, Wardana dan Sukaatmadja. 2016. Pengaruh Sikap, Norma Subjektif, Dan Persepsi Kontrol Keperilakuan, Terhadap Niat Siswa Smk Di Kota Denpasar Untuk Menjadi Wirausaha *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*. ISSN : 2337-3067.
- Meilisha Djati Arum dan A. Anwar Prabu Mangkunegara, 2010. Peran Sikap, Norma Subjektif, dan Persepsi Kendali Perilaku Dalam Memprediksi Intensi Wanita Melakukan Pemeriksaan Payudara Sendiri Fakultas Psikologi, *Universitas Mercu Buana*, Vol. 1, No. 3, 162-172. ISSN 2085-4242.
- Neila Ramdhani, 2011. Penyusunan Alat Pengukur Berbasis Theory of Planned Behavior *Buletin Psikologi Fakultas Psikologi, Universitas Gadjah Mada*, Volume 19, No. 2, 55-69, ISSN 0854-7108.
- Nur Hadiati Endah, 2014. Perilaku Pembelian Kosmetik Berlabel Halal Oleh Konsumen Indonesia Consumers's Purchasing Behavior Toward Halal Labeled Cosmetics In Indonesia *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Pusat Penelitian Ekonomi LIPI* Vol 22, No. 1.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.
- Salim, Agus, 2007, *Hand Out Materi filsafat dan Teori Perencanaan*, PSKMP
- Santoso, U. 2007. Masalah Lingkungan dan Solusinya di Propinsi Bengkulu, Bangka Belitung dan Lampung. *Acara Diskusi Pusat Studi Lingkungan Hidup dan Lembaga Pengelola Lingkungan Hidup Daerah*. Batam.

- Sugiono, 2016. *Statistika Untuk Penelitian*, Cetakan ke Dua Puluh Tujuh , Bandung: Alfabeta.
- Status Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung Tahun 2015. Kementerian Lingkungan Hidup.
- Singarimbun, Masri dan Efendi, Sofian.,1996. *Metode Penelitian Survey*, Jakarta: LP3ES.
- Tatang. M Amirin, 2010. Skala Likert: *Penggunaan dan analisis datanya*: A Blog of Yogyakarta State-University's Blogs
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Werner, P. 2004. Reasoned Action and Planned Behavior, in S.J. Peterson and T.S. Bredow (eds), *Middle range Theories: Application to Nursing Research*, Lippincott Williams and Wilkins, Philadelphia, pp. 125-147.
- Wahyu Widhiarso, 2010. Pengembangan Skala Psikologi :*Lima Kategori Respons ataukah Empat Kategori Respons?*, Fakultas Psikologi UGM